

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

PADA

PENGADILAN NEGERI

KOTA AGUNG

TRIWULAN I

TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**

Disahkan di Kota Agung
Pada Hari Kamis, 17 April 2025

Management Representative,

Ketua Tim Survei,

ANDINA NAFERDA, S.H.



DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	1
1.4. Rencana Kerja	2
BAB II	4
METODOLOGI.....	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel.....	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	6
BAB III.....	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI.....	8
3.1. Profil responden	8
3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator.....	9
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	20
BAB IV	25
PENUTUP	25
4.1. Kesimpulan.....	25
4.2. Rekomendasi	26
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	 27

DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>		<i>Halaman</i>
1.	Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Anti Korupsi	6
2.	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	7
3.	Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan	10
4	Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	11
5	Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia	12
6.	Indeks pada Indikator Informasi Tarif/Biaya	13
7.	Indeks pada Indikator Biaya Tambahan	14
8.	Indeks pada Indikator Hadiah	15
9.	Indeks pada Indikator Bukti Transaksi Pembayaran	16
10.	Indeks pada Indikator Percaloan	17
11.	Indeks pada Indikator Praktek KKN.....	18
12.	Indeks pada Indikator Mengurus Perkara	19
13.	Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Kota Agung	20
14.	Nilai Rata-Rata Indikator Persepsi Anti Korupsi (IPAK).....	23

DAFTAR GAMBAR

<i>No.</i>	<i>Gambar</i>	<i>Halaman</i>
1.	Model Alur Penyusunan Survei IPAK Menuju Zona Integritas	6
2.	Responden Menurut Karakteristik Usia Responden.....	8
3.	Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin Responden.....	8
4.	Responden Menurut Karakteristi Tingkat pendidikan responden	9
5.	Responden Menurut Karakteristik Jenis Pekerjaan Responden	9
6.	Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan.....	10
7.	Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan	11
8.	Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia	12
9.	Indeks pada Indikator Informasi Tarif/Biaya	13
10.	Tabel Indeks Biaya Tambahan	14
11.	Indeks pada Indikator Hadiah	15
12.	Indeks pada Indikator Bukti Transaksi Pembayaran	16
13.	Indeks pada Indikator Percaloan	17
14.	Indeks pada Indikator Praktek KKN	18
15.	Indeks pada Indikator Mengurus Perkara	19
16.	Nilai Publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner pada Aplikasi
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pengukuran/survei indeks persepsi anti korupsi (IPAK) Triwulan I Tahun 2022 di Pengadilan Negeri Kota Agung ini dilaksanakan pada tanggal **1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025**.

1.4.3. Metode Survei

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan jawaban terbuka. Setiap Responden mengisi kuisioner melalui aplikasi SiSuper dengan menggunakan media handphone smart phone atau pun dengan menggunakan perangkat komputer yang terhubung dengan internet.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Kota Agung.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui aplikasi kuesioner yang disi tanpa wawancara tatap

muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 bulan. Selanjutnya data dikalkulasi oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan dengan memanfaatkan hasil perhitungan dari aplikasi SiSuper.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

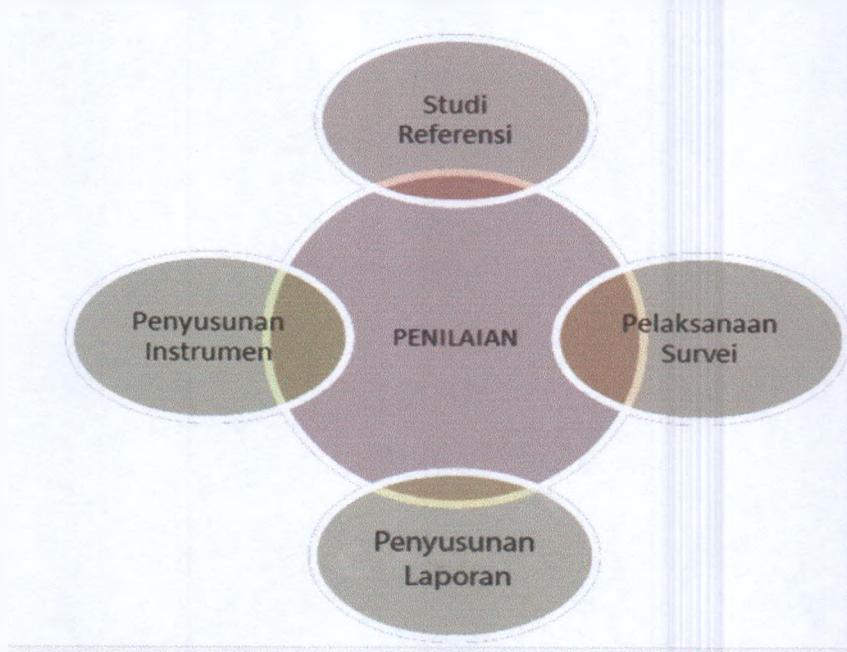
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1
Model Alur Penyusunan Survei IPAK Menuju Zona Integritas



Tabel 1
Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 2
**Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan
Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	3,5324 - 4,0000	88,31 – 100,00	A	Bersih dari korupsi
2	3,0644 - 3,5320	76,61 – 88,30	B	Cukup bersih dari korupsi
3	2,6000 - 3,0640	65,00 – 75,60	C	Kurang bersih dari korupsi
4	1,0000 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Kelompok usia responden

Mayoritas responden ini berusia 29-39 tahun dengan jumlah 42 orang dari total 93 responden (45,16 %).

Gambar 2
Responden Menurut Karakteristik Usia Responden

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN		
  Preview Publikasi		
Deskripsi	Jumlah Orang	% (Persen)
18 - 28 Th	21	22,58
29 - 39 Th	42	45,16
40 - 49 Th	23	24,73
50 - 59 Th	6	6,45
60 - 69 Th	1	1,08
Total	93	

3.1.2. Kelompok Jenis Kelamin Responden

Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki-laki yang berjumlah 63 orang dari total 93 responden.

Gambar 3
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

JUMLAH

93 RESPONDEN

JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI : 63 ORANG

PEREMPUAN : 30 ORANG

3.1.3. Tingkat Pendidikan Responden

Mayoritas Pendidikan Terakhir Responden adalah SMU yang berjumlah 44 orang dari total 93 responden.

Gambar 4
Responden Menurut Karakteristik Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 11 ORG	Diploma 3 : 4 ORG
	SMP : 19 ORG	S1 : 13 ORG
	SMU : 44 ORG	S2 : 2 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG

3.1.4. Pekerjaan Responden

Mayoritas Pekerjaan Utama Responden adalah Lainnya yang berjumlah 81 orang dari total 93 responden.

Gambar 5
Responden Menurut Karakteristik Jenis Pekerjaan

PEKERJAAN	PNS : 5 ORG	SWASTA : 3 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRASAHA : 0 ORG
	POLRI : 4 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
	LAINNYA : 81 ORG	

3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

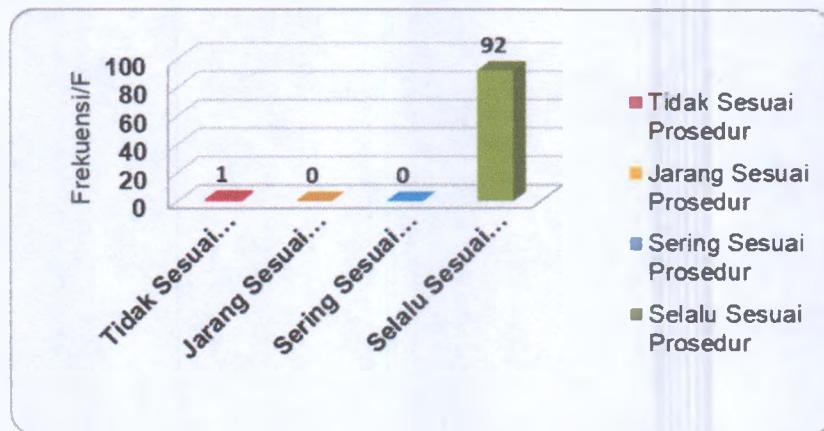
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar "4,00" berada pada interval skor "3,5324 s/d 4" kategori "A". Dengan demikian layanan pengadilan, pada "Indikator Manipulasi Peraturan" berada pada kategori "Bersih dari korupsi".

Tabel 3
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Sesuai Prosedur	1	1	1,08
2.	Jarang Sesuai Prosedur	2	0	0,00
3.	Sering Sesuai Prosedur	3	0	0,00
4.	Selalu Sesuai Prosedur	4	92	98,92
	Jumlah		93	100

Gambar 6
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan



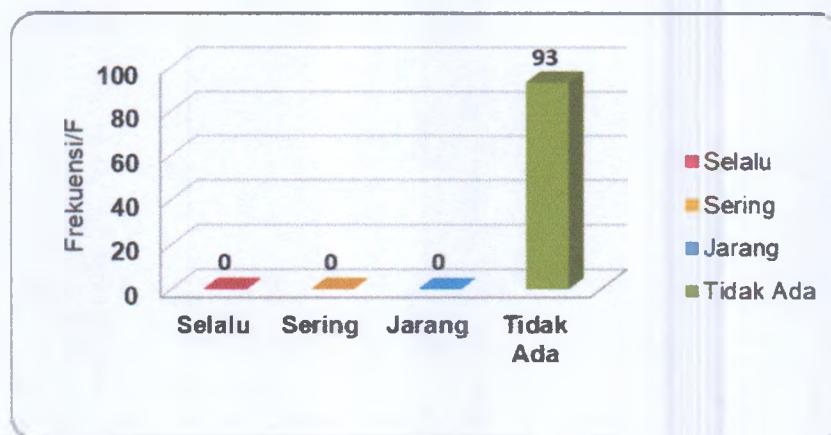
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar "4,00" berada pada interval skor "3,5324 s/d 4" kategori "A". Dengan demikian layanan pengadilan, pada "Indikator Penyalahgunaan Jabatan" berada pada kategori "Bersih dari korupsi".

Tabel 4
Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Petugas melayani selalu meminta imbalan	1	0	0,00
2.	Petugas melayani sering meminta imbalan	2	0	0,00
3.	Petugas melayani jarang meminta imbalan	3	0	0,00
4.	Petugas melayani tanpa meminta imbalan	4	93	100,00
Jumlah			93	100

Gambar 7
Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan



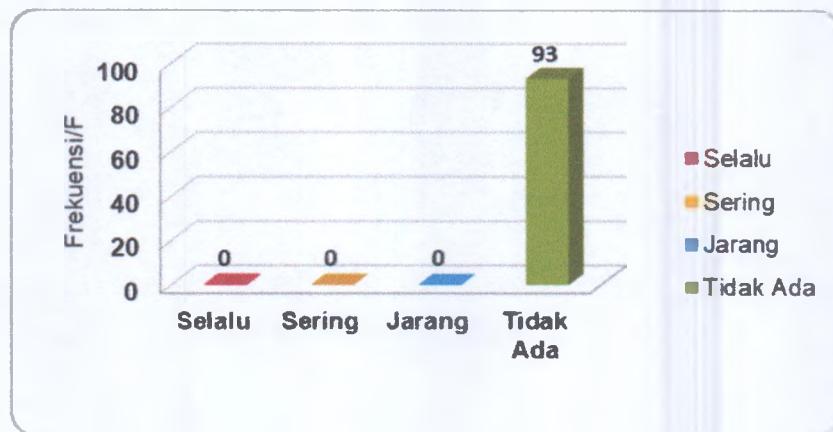
3.2.3. Indikator Transaksi Rahasia

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar "4,00" berada pada interval skor "3,5324 s/d 4" kategori "A". Dengan demikian layanan pengadilan, pada "Indikator Transaksi Rahasia" berada pada kategori "Bersih dari korupsi".

Tabel 5
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	0	0,00
4.	Tidak Ada	4	93	100,00
		Jumlah	93	100

Gambar 8
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia



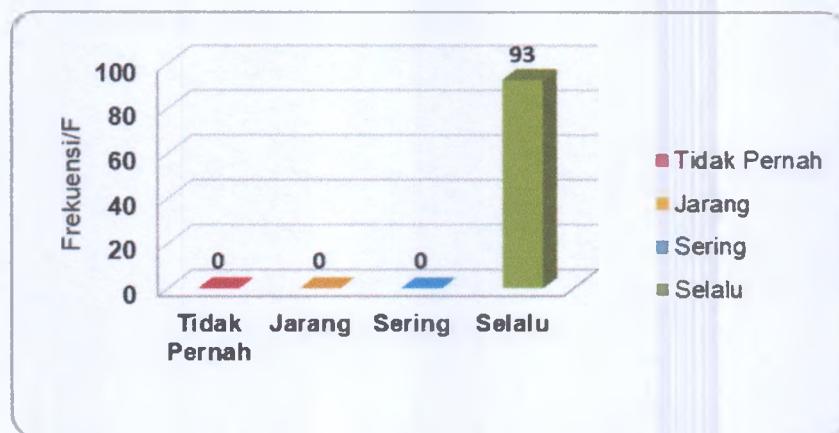
3.2.4. Indikator Informasi Tarif/Biaya

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar "4,00" berada pada interval skor "3,5324 s/d 4" kategori "A". Dengan demikian layanan pengadilan, pada "Indikator Informasi Tarif/Biaya" berada pada kategori "Bersih dari korupsi".

Tabel 6
Indeks pada Indikator Informasi Tarif Biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	1	0	0,00
2.	Jarang	2	0	0,00
3.	Sering	3	0	0,00
4.	Selalu	4	93	100,00
	Jumlah		93	100

Gambar 9
Indeks pada Indikator Informasi Tarif/Biaya



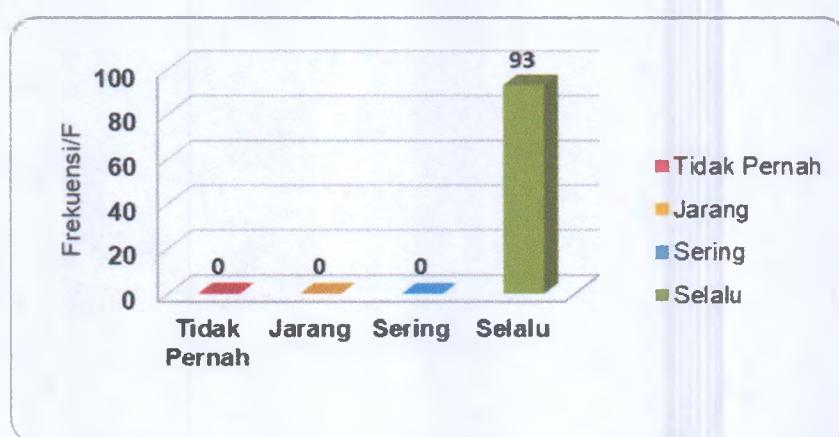
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar "4,00" berada pada interval skor "3,5324 s/d 4" kategori "A". Dengan demikian layanan pengadilan, pada "Indikator Biaya Tambahan" berada pada kategori "Bersih dari korupsi".

Tabel 7
Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	1	0	0,00
2.	Jarang	2	0	0,00
3.	Sering	3	0	0,00
4.	Selalu	4	93	100,00
Jumlah			93	100

Gambar 10
Tabel Indeks pada Indikator Biaya Tambahan



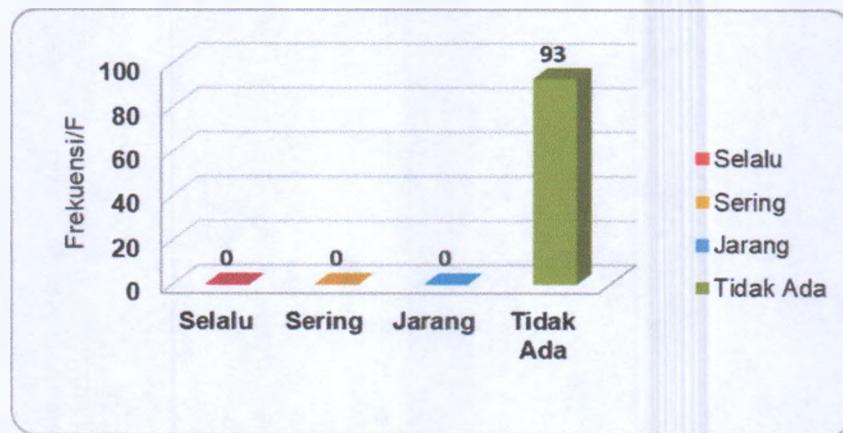
3.2.6. Indikator Hadiah

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar "4,00" berada pada interval skor "3,5324 s/d 4" kategori "A". Dengan demikian layanan pengadilan, pada "Indikator Hadiah" berada pada kategori "Bersih dari korupsi".

Tabel 8
Indeks pada Indikator Hadiah

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	0	0,00
4.	Tidak Ada	4	93	100,00
Jumlah			93	100

Gambar 11
Indeks pada Indikator Hadiah



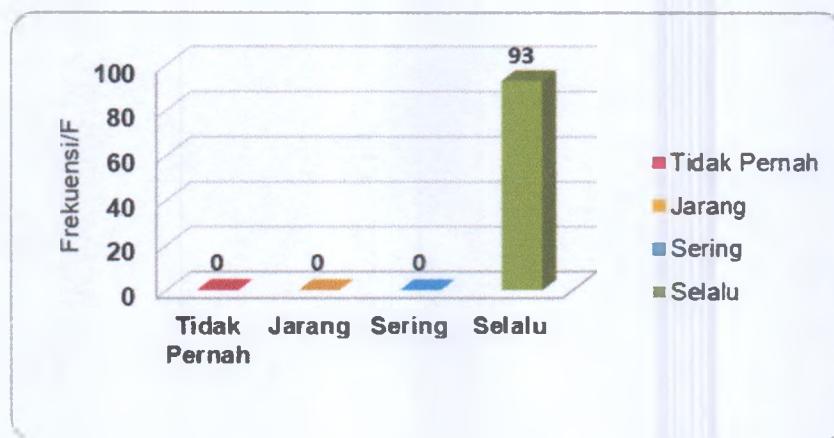
3.2.7. Indikator Bukti Transaksi Pembayaran

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar "4,00" berada pada interval skor "3,5324 s/d 4" kategori "A". Dengan demikian layanan pengadilan, pada "Indikator Bukti Transaksi Pembayaran" berada pada kategori "Bersih dari korupsi".

Tabel 9
Indeks pada Indikator Bukti Transaksi Pembayaran

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	1	0	0,00
2.	Jarang	2	0	0,00
3.	Sering	3	0	0,00
4.	Selalu	4	93	100,00
Jumlah			93	100

Gambar 12
Indeks pada Indikator Bukti Transaksi Pembayaran



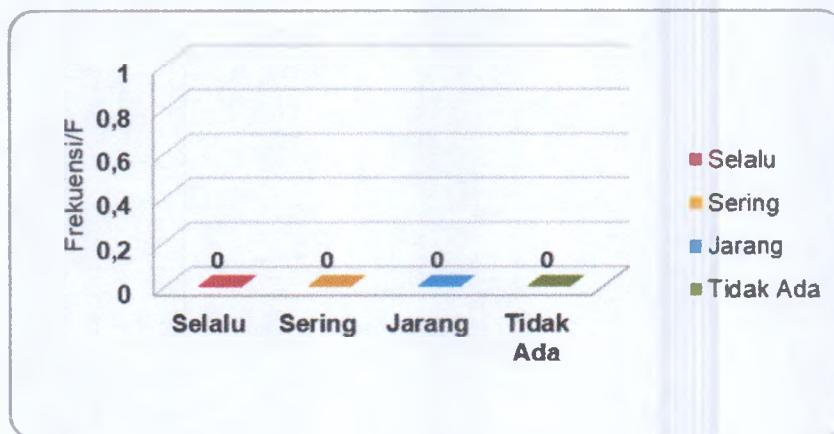
3.2.8. Indikator Percaloan

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar "4,00" berada pada interval skor "3,5324 s/d 4" kategori "A". Dengan demikian layanan pengadilan, pada "Indikator Percaloan" berada pada kategori "Bersih dari korupsi".

Tabel 10
Indeks pada Indikator Percaloan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	0	0,00
4.	Tidak Ada	4	93	100,00
		Jumlah	93	100

Gambar 13
Indeks pada Indikator Percaloan



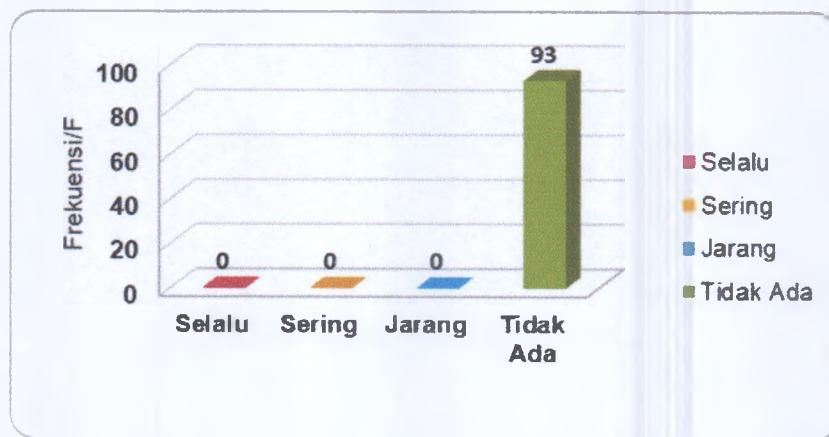
3.2.9. Indikator Praktek KKN

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar "4,00" berada pada interval skor "3,5324 s/d 4" kategori "A". Dengan demikian layanan pengadilan, pada "Indikator Praktek KKN" berada pada kategori "Bersih dari korupsi".

Tabel 11
Indeks pada Indikator Praktek KKN

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	0	0,00
4.	Tidak Ada	4	93	100,00
		Jumlah	93	100

Gambar 14
Indeks pada Indikator Praktek KKN



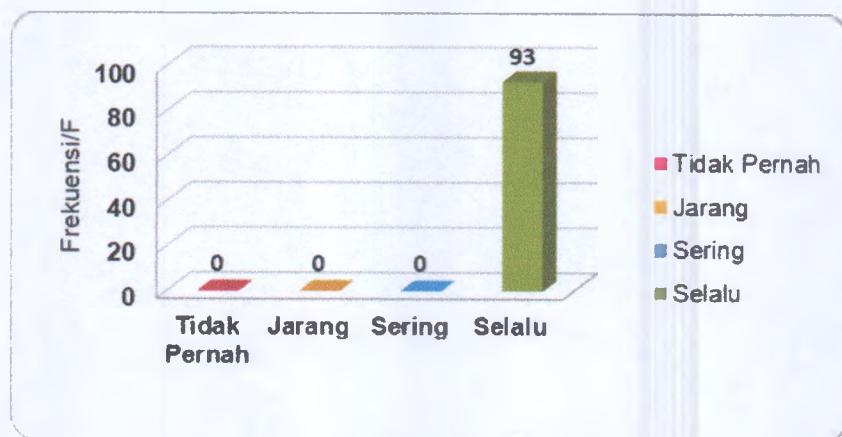
3.2.10. Indikator Mengurus Perkara

Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar "4,00" berada pada interval skor "3,5324 s/d 4" kategori "A". Dengan demikian layanan pengadilan, pada "Indikator Mengurus Perkara" berada pada kategori "Bersih dari korupsi".

Tabel 12
Indeks pada Indikator Mengurus Perkara

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	1	0	0,00
2.	Sering	2	0	0,00
3.	Jarang	3	0	0,00
4.	Tidak Ada	4	93	100,00
	Jumlah		93	100

Gambar 15
Indeks pada Indikator Mengurus Perkara



Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Tabel 13
Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kota
Agung

No. Resp.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

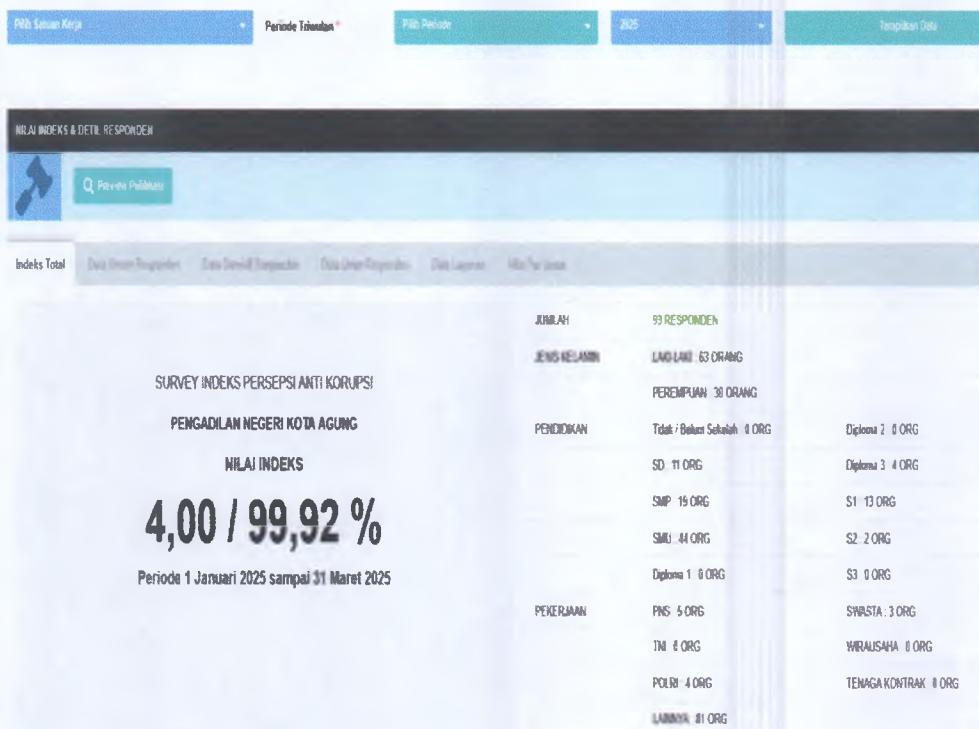
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
51	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
69	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
87	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Nilai / Unsur	369	372	372	372	372	372	372	372	372	372	
NRR / Unsur	3,97	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
NRR / Tertimbang	0,40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
IKM Unit Pelayanan											99,92
Status Kepuasan											A (Bersih dari korupsi)

Tabel 14
Nilai Rata-Rata Indikator Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Manipulasi Peraturan	3,97
U2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
U3	Transaksi Rahasia	4,00
U4	Informasi Tarif/Biaya	4,00
U5	Biaya Tambahan	4,00
U6	Hadiah	4,00
U7	Bukti Transaksi Pembayaran	4,00
U8	Percaloan	4,00
U9	Praktek KKN	4,00
U10	Mengurus Perkara	4,00

Gambar 16
Nilai Publikasi Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi terhadap Pengadilan Negeri Kota Agung secara keseluruhan adalah **4,00** artinya nilai rata-rata dari seluruh unsur penilaian berada pada kategori **Bersih Dari Korupsi** dengan mutu kinerja **A**;
2. Berdasarkan urutan besaran IPAK hasil dari penilaian masyarakat, terdapat 3 unsur yang tertinggi yaitu:



3. Berdasarkan urutan besaran IPAK hasil dari penilaian masyarakat, terdapat 3 unsur yang terendah yaitu:



4. Semua unsur penilaian diapresiasi secara baik oleh masyarakat, namun demikian masih ada unsur penilaian yang dianggap terendah yaitu pada unsur **Manipulasi Peraturan (369)**;

B. Rekomendasi

1. Semua unsur atau unit pelayanan di Pengadilan Negeri Kota Agung perlu dipertahankan dan ditingkatkan kinerjanya, agar unsur yang telah sangat baik dapat dipertahankan atau meningkatkan kinerjanya, sementara unsur yang masih rendah nilainya dapat ditingkatkan dalam survei mendatang menjadi lebih baik, begitu juga unsur-unsur penilaian yang berada di nilai tengah dapat lebih ditingkatkan lagi kinerjanya.
2. Hasil survei untuk mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini dapat dijadikan dasar dan bahan melakukan evaluasi kinerja oleh semua pegawai di Pengadilan Negeri Kota Agung, mulai dari pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, tenaga honorer, hingga petugas kebersihan dan pada akhirnya juga bermanfaat untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Survei kepuasan masyarakat ini hendaknya dilakukan secara periodik satu tahun sekali dengan jumlah responden yang semakin banyak, agar lebih representatif mewakili penilaian masyarakat dan juga dapat mengukur perkembangan kinerja Pengadilan Negeri Kota Agung.

LAMPIRAN

LINK APLIKASI KUISIONER IPAK

esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/477306

Screenshoot Aplikasi Kuisioner IPAK:

The screenshot shows a web-based survey application titled "APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK". The main title bar says "Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK". Below it, a sub-header reads "Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan". The interface is divided into several tabs: "Data Respon...", "Layanan", "Form Ku...", and "Kesan & ...". The "Data Respon..." tab is active, displaying a form titled "Data Responden SPAK". The form fields include:

- Nama:** [Input field] - placeholder: boleh kosong atau tidak diminta.
- Umur / Jenis Kelamin:** [Input field] - placeholder: minimal 18 Tahun. Includes dropdown menus for "Pilih Jenis Kelamin" and "Tahun".
- Nomor HP:** [Input field] - placeholder: +62. Example: +62 81211112222. Includes a note: Contoh: +62 81211112222.
- Domicili:** [Input field] - placeholder: Pilih Wilayah. Includes a dropdown menu.
- Pendidikan:** [Input field] - placeholder: Pilih Pendidikan. Includes a dropdown menu.
- Pekerjaan:** [Input field] - placeholder: Pilih Pekerjaan. Includes a dropdown menu.

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Kembali" and "Selanjutnya".

Survey SPAK SIK Hukum | X

Not secure | survey.badiium.mahkamahsgung.go.id/index.php/kontrol.jsp

Apps Gmail MA SPP FN KOT BS SPP MA Top MS

Reading list

Survey Perpustakaan Konsensi SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadaan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1 Apakah Dilegakan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

Tidak Sesuai Prosedur
Jarang Sesuai Prosedur
Sering Sesuai Prosedur
Selalu Sesuai Prosedur

2 Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dan ditugaskan untuk meminta imbalan tertentu ?

Petugas melayani selalu meminta imbalan
Petugas melayani sering meminta imbalan
Petugas melayani jarang meminta imbalan
Petugas melayani tanpa meminta imbalan

3 Pernahkah dibutuhkan oleh seseorang (karyawwan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara

Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada

4 Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?

Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu

5 Apakah di Pengadilan selalu membaysas sesuai tarif resmi tetapi ada biaya tambahan?

Kembali Selanjutnya

6 Apakah memberikan tanda termasuk atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?

Selalu
Sering
Jarang
Sering
Selalu

7 Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?

Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu

8 Apakah pernah mengalami ada perbedaan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?

Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada

9 Apakah pernah melihat dan atau mendengar maafan terjadi praktik ikrar di Pengadilan ?

Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada

10 Apakah pernah mengurus berlara melalui Hakim / Panitia / Staff Pengadilan diuar pertidangan ?

Selalu
Sering
Jarang
Tidak Ada